



**MENGUKUR DAMPAK PENGANGGURAN, TINGKAT PENDIDIKAN,  
UPAH MINIMUM, DAN PENGELUARAN PER KAPITA TERHADAP  
KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR**

***Estimating the Impact of Unemployment, Education Level, Minimum  
Wage, and Per Capita Expenditure on Poverty in Makassar City***

**Eka Nurcitra Ayu Ningtias<sup>1</sup>, Andi Faisal Anwar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id

*Article History: Received: 16 February 2021; Revised: 20 February 2021; Accepted: 23 February 2021*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jenis data deret waktu tahunan dalam periode 2008-2018 (10 tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21, dari model ini menunjukkan berapa besar pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Implikasi dari penelitian ini yakni diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan performa pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi golongan miskin. Terkhusus pemerintah harus meningkatkan dan mengoptimalkan akses pendidikan sampai ke kaum rentan miskin. Selain itu peningkatan upah minimum yang lebih baik, dan kolaborasi yang menyeluruh antar stakeholder untuk pengentasan kemiskinan.

**Kata kunci:** *Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Kemiskinan*

---

**ABSTRACT**

*This study aims to see whether there is an effect of unemployment, education level, minimum wage, and capita expenditure on poverty in Makassar City. This research is a type of quantitative research. The data used are secondary data with the type of annual time series data in the 2008-2018 (10 years) period obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis using SPSS version 21, this model shows how much influence occurs between the independent variables on the dependent variable. The results of this study indicate that the unemployment variable, the education level, the minimum wage, and the per capita expenditure have a positive and significant effect on poverty in Makassar City. The implication of this research requires efforts from various parties to improve the performance of education in increasing the standard of living of the community, especially for the poor. Especially the government must improve and optimize access to education*

---



---

*for the vulnerable to the poor. In addition, a better minimum wage increase, and comprehensive collaboration among stakeholders for poverty alleviation.*

**Keywords:** *Unemployment, Education Level, Minimum Wage, Poverty*

---

## **PENDAHULUAN/INTRODUCTION**

Masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar cukup kompleks karena beragamnya kondisi sosial masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda-beda. Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional, hal tersebut merupakan pencapaian yang membanggakan, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami peningkatan ditengah-tengah merosotnya ekonomi global dan ekonomi dunia yang tidak stabil. angka kemiskinan justru tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Kemiskinan di Kota Makassar makin mengkhawatirkan. Meskipun dikatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk mencegah kemiskinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati kesejahteraan, terkhusus untuk masyarakat miskin. Pengeluaran pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan diberbagai daerah semakin besar dari waktu ke waktu, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan output pengentasan kemiskinan (Ginting, 2019; Heitzmann & Matzinger, 2020; McWilliam, Wianti, & Taufik, 2021; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; Sharaunga & Mudhara, 2021).

Kebaruan dari penelitian ini adalah estimasi terhadap kemiskinan Kota Makassar yang didekati dengan pendekatan edukasi, pengangguran dan upah minimum serta pengeluaran perkapita. Sementara studi sebelumnya (Anwar & Aswandi, 2019) persoalan pendapatan dan kemiskinan Kota Makassar di potret dari perspektif ekonomi lingkungan saja, dengan pendekatan kualitatif. Sementara, riset ini mencoba mengestimasi lebih jauh persoalan kemiskinan Kota Makassar, dengan perspektif yang berbeda dengan pendekatan kuantitatif.

Menurut Keynes (dalam Aisyah, 2020) terkait pengangguran bila harga dari tenaga kerja (upah) cukup fleksibel, maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja. Tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela, artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Sedangkan mereka yang menganggur, hanyalah orang-orang yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku atau penganggur yang sukarela (Aspromourgos, 2019; Festré, 2019; Oner, 2015; Singerman, 2016; Üsenmez, 2017)

Berbeda dengan pandangan Marx (dalam Rioux, et.all, 2020) bahwa dalam sistem *free labor market*, akan memunculkan kompetisi antar industri dan akan menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat, tentunya memiliki modal yang paling banyak. Dengan munculnya monopoli modal tersebut, maka pemilik kapital yang mengendalikan jalannya sistem produksi perusahaan-

perusahaan, termasuk menentukan upah buruh dengan murah. Menurutny dalam sistem ini, pemilik modal melakukan penghisapan atas buruh. Pada kondisi yang sulit ini, buruh benar-benar tergantung atas pemilik kapital. Buruh yang tidak produktif, bisa saja tidak dipekerjakan lagi dan ikut memperparah angka pengangguran. Dalam analisis Marx dalam konsep "kelas buruh", apabila semua proses produksi dan pemasaran terpengaruh oleh pemilik modal semata, maka akan berakibat pada masyarakat kecil yang memiliki kapital yang relatif lebih kecil. Dalam hal ini, terjadi kompetisi yang tidak seimbang, pemilik modal cenderung lebih dominan mengatur jalannya pasar tenaga kerja (Amal, 2018; Bardhan & Roemer, 1994; Ehret, 2014; Shleifer & Vishny, 1994)

Marjit, Ganguly, & Acharyya (2020) upah minimum merupakan usaha untuk memperbaiki penghidupan penduduk yang berpendapatan rendah, terutama bagi pekerja yang tergolong miskin. Semakin meningkat upah minimum, maka akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat. Konsekuensi dari upah minimum dalam perilaku pencarian kerja, memberikan jaminan upah yang layak bagi tenaga kerja di perusahaan (Arango & Flórez, 2020; Averett, Smith, & Wang, 2020; Braun, Döhrn, Krause, Micheli, & Schmidt, 2020; Dütsch & Himmelreicher, 2020; Heise, 2020; Kaufman, 2020; Marjit et al., 2020). Menurut Adam Smith (dalam Sabia, et.all 2019) mengemukakan bahwa upah ditentukan oleh biaya hidup pekerja. Menurutny, tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan dengan *prinsip division of labor*. Upah minimum tidak mempengaruhi peningkatan lapangan kerja, tetapi secara substansial meningkatkan hasil upah dengan tingkat produksi tertentu (Soundararajan, 2019).

Demikian halnya dengan Ricardo (dalam Evensky, 1993) berpendapat bahwa upah ditentukan oleh interaksi permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi) tenaga kerja. Dan tingkat upah sebagai balas jasa bagi tenaga kerja merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan para tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa perbaikan upah hanya ditentukan oleh tingkat produksi tenaga kerja itu sendiri dan pembentukan upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar.

Wang & Yang (2020) kemiskinan adalah fenomena masyarakat yang sederhana dan kompleks. Ini berdampak besar pada individu dalam berbagai aspek. Dalam beberapa abad terakhir, terdapat kontradiksi antara si kaya dan si miskin, yang berangsur-angsur muncul dan beberapa stereotipe kemiskinan telah berkembang. Kelompok miskin tertentu mendapat stigma hidup serba kekurangan. Menurut teori Malthus (dalam Wietzke, 2020) bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tidak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari ketersediaan bahan makanan. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Artinya,

jika tidak dibatasi penduduk, maka akan kekurangan makanan, hal inilah juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Masyarakat selalu terjebak perangkap fertilitas. Tingkat kesuburan untuk orang miskin dan tidak miskin sama-sama tinggi, yang menyebabkan tingkat fertilitas tinggi, kedua kelas tersebut terjebak dalam "perangkap Malthusian". Dalam kondisi ini, pengaruh jumlah penduduk dan kemiskinan cukup tinggi, terutama jika pengaruh negatif fertilitas tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (Benfica & Henderson, 2020; Bradford, 2020; McWilliam et al., 2021; Workneh, 2020). Lain halnya dengan Marx (dalam Greenhill & Wilson, 2006) bahwa mereka menentang teori Malthus. Marx dan Engels berpendapat bahwa ide pertumbuhan bahan makanan yang mengikuti pola deret hitung tersebut tidak benar. Artinya, selama ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan baik, maka mampu meningkatkan produksi bahan makanan atau barang-barang lainnya sama seperti jumlah populasi. Maka tidak akan terjadi kemiskinan. Pendapat yang sebaliknya diutarakan oleh Marx bahwa jumlah produksi justru ditentukan oleh jumlah tenaga kerja sebab yang menciptakan nilai atas sebuah barang adalah buruh, untuk itu produksi berbanding linear dengan tenaga kerja (Gare, 2020; Rioux et al., 2020)

#### **BAHAN DAN METODE/ MATERIAL AND METHOD**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. yaitu metode penelitian yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Data kuantitatif ini berupa data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data kuantitatif yang dikumpulkan melalui data sekunder dari BPS) Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

Selain itu juga terdapat studi literatur baik buku, publikasi jurnal, serta sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data indeks kemiskinan menjadi variabel dependen. Sementara untuk variabel independen, diantaranya pengangguran dalam satuan jiwa, tingkat pendidikan berdasarkan satuan persen, upah minimum berdasarkan satuan rupiah, dan pengeluaran per kapita berdasarkan satuan rupiah. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dari tahun 2008 – 2018.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis model Regresi Berganda. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat dan memiliki pengaruh. Variabel yang akan diestimasi adalah variabel terikat, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel bebas. Metode ini memperlihatkan hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan untuk melihat pengaruh pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar.

Teknik yang digunakan dengan persamaan *Exponential Function* dengan *Multiple Regression*, sebagai berikut;

$$Pvty_t = \beta_0 Umply_t^{\beta_1} LEdc_t^{\beta_2} MWg_t^{\beta_3} PcExp_t^{\beta_4} \mu^t \quad (1)$$

Untuk mengestimasi koefisien regresi, sesuai pendapat Feldstein (1988) dilakukan transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural (*ln*) parsial ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$LnPvty_t = Ln\beta_0 + \beta_1 LnUmply_t + \beta_2 LnLEdc_t + \beta_3 LnMWg_t + \beta_4 LnPcExp_t + \mu_t \quad (2)$$

Dimana, *Pvty* adalah Kemiskinan.  $\beta_0$  merupakan *Intercept* atau bilangan konstanta,  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  adalah nilai Koefisien Regresi, *Umply* adalah Pengangguran (jiwa); *LEdc* merupakan Tingkat Pendidikan; sementara *MWg<sub>t</sub>* adalah Upah Minimum, *PcExp* merupakan Pengeluaran Per kapita; *Ln* merupakan Logaritma Natural, *t* merupakan *Time Series/cross section*;  $\mu$  merupakan residual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / RESULT AND DISCUSSION

**Tabel 1. Estimasi Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar.**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,672	149286,652		0,713	0,508
Pengangguran	0,345	2,010	0,031	0,172	0,000
Tingkat Pendidikan	0,628	5,311	-0,215	1,248	0,007
Upah Minimum	0,110	0,007	-0,256	1,418	0,016
Pengeluaran Per kapita	0,853	0,153	0,913	5,569	0,003

Sumber: Output data sekunder setelah diolah, Tahun 2019; (Citra, 2019)

$$Y = 10,672 + 0,345 + 0,628 + 0,110 + 0,853$$

Nilai Konstanta (a). Nilai konstanta sebesar 10,672 yang berarti jika pengangguran ( $X_1$ ), tingkat pendidikan ( $X_2$ ), upah minimum ( $X_3$ ), dan pengeluaran per kapita ( $X_4$ ) nilainya konstan atau 0 maka nilai Kemiskinan (Y) sebesar 10,672. Variabel pengangguran ( $X_1$ ), output koefisien regresi linear untuk variabel pengangguran sebesar 0,345 artinya jika nilai pengangguran meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,345. Sedangkan variabel tingkat Pendidikan ( $X_2$ ) menunjukkan output koefisien regresi linear untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0,628 artinya jika nilai tingkat pendidikan meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,628. Lain halnya dengan upah minimum ( $X_3$ ) menunjukkan output koefisien regresi linear untuk variabel upah minimum sebesar 0,110 artinya jika nilai upah minimum meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,110. Terakhir, pengeluaran Per Kapita ( $X_4$ ), menunjukkan output koefisien regresi linear untuk variabel pengeluaran per kapita

sebesar 0,853 artinya jika nilai pengeluaran per kapita meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,853.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interpretasi model secara rinci atau spesifik mengenai hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Makassar**

Tabel uji parsial t menunjukkan nilai variabel pengangguran ( $X_1$ ) pada tabel coefficient sebesar  $0,000 < 0,05$ . sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang artinya pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aiyedogbon (2012) yang meneliti relasi pengangguran terhadap kemiskinan di Nigeria, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya lapangan kerja merupakan alasan utama terjadinya kemiskinan. Mengingat kekuatan kuat yang berperan dalam ekonomi global, masalah-masalah ini menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat luas, oleh karena itu direkomendasikan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan menghentikan pengangguran. Pemerintah juga harus berusaha meyakinkan masyarakatnya untuk mengontrol angka kelahiran. Sejauh ini belum ditemukan riset yang bertentangan dengan hal tersebut, pengangguran dalam berbagai temuan, selalu berbanding lurus dengan kemiskinan.

### **2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar**

Tabel uji parsial t menunjukkan nilai variabel tingkat pendidikan ( $X_2$ ) pada tabel coefficient sebesar  $0,007 < 0,05$ . sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012) dimana hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebab, pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh untuk beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja. Adapun penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Amartya Sen (dalam Alkire, 2007) bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan tingkat variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di New York, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih kurangnya pengembangan diri terutama dalam pendidikan dan kesehatan yang cenderung mengarah kepada lingkaran kemiskinan. Dalam hal ini, ia menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah dengan pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, dan memperbaiki kesempatan kerja mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak mereka.

Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pedapatan. Oleh karena itu dalam memberantas kemiskinan, salah satu caranya dengan meningkatkan pendidikan. Namun hal itu bertentangan dengan riset Kumah, et.all (2020) yang meneliti polarisasi kemiskinan di Afrika bahwa faktor pendidikan tidak merubah kemiskinan itu sendiri, sebab terdapat budaya yang menempatkan perempuan sebagai kelas kedua, yang memarginalisasi kaum miskin, khususnya perempuan.

### **3. Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Makassar**

Tabel uji parsial t menunjukkan nilai variabel upah minimum ( $X_3$ ) pada tabel coefficient sebesar  $0,016 < 0,05$ . sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang artinya upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Stevans dan Sessions (2001) bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di United States, dimana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kurangnya upah dan tidak meratanya upah di United States membuat masyarakat masuk dalam kesengsaraan yang dapat mengarah pada kemiskinan. Memperluas cakupan upah minimum dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja keduanya memiliki dampak yang lebih besar pada tingkat kemiskinan dibandingkan dengan perubahan setara dalam tingkat upah minimum. Lebih lanjut tersirat dari hasil empiris bahwa cara paling efektif untuk mengangkat keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan adalah kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan upah minimum, mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja, menaikkan upah minimum, dan mensubsidi pendidikan tinggi. bahwa upah minimum mempunyai hubungan terbalik dengan kemiskinan. Jika upah minimum meningkat, maka tingkat kemiskinan akan turun. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kaufman (2010) bahwa semakin meningkat tingkat upah minimum akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan. Namun temuan tersebut bertentangan dengan Wiguna (2019) yang menganalisis variabel yang menentukan penyerapan tenaga kerja di industri di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Menggunakan data tingkat Kabupaten / Kota, persamaan menggunakan regresi untuk melihat pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja industri di daerah itu. Hasil riset itu menunjukkan bahwa upah minimum bukanlah penentu utama penyerapan tenaga kerja dan mereduksi angka kemiskinan.

### **4. Pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar**

Tabel uji parsial t menunjukkan nilai variabel pengeluaran per kapita ( $X_4$ ) pada tabel coefficient sebesar  $0,003 < 0,05$ . sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis parsial t jika nilai sig.  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak yang

artinya pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk, dimana kesimpulan penelitiannya diperoleh bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Sebab, tidak dikatakan dalam kemiskinan jika berada pada standar hidup layak, dikatakan standar hidup layak jika terjadi peningkatan konsumsi. Adapun penelitian ini sejalan dengan pendapat Houghton dan Khandker (dalam Tuyen, 2015) bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan di Vietnam dimana kesimpulannya menyatakan bahwa dengan melihat pengeluaran seseorang dapat menyimpulkan apakah mereka termasuk dalam kemiskinan atau terbebas dari kemiskinan. Pekerja sektor non pertanian, praktis memiliki pengeluaran perkapita yang lebih besar di Vietnam. Semakin tinggi pengeluaran, semakin mereka jauh dari lingkaran kemiskinan. Adapun dalam mengukur kemiskinan terdapat dua pendekatan yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan rumah tangga menarik untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga. Pengeluaran publik dapat efektif dalam mengurangi kemiskinan hanya ketika peraturan kebijakannya tepat.

## **KESIMPULAN / CONCLUTIONS**

Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan model regresi berganda dengan data sekunder time series dalam periode 2008-2018. Dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Rekomendasi dari penelitian ini sangat diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan performa pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi golongan miskin. Terkhusus pemerintah harus meningkatkan dan mengoptimalkan akses pendidikan sampai ke kaum rentan miskin. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian dan keterampilan, serta kemampuan dalam berbagai bidang untuk menciptakan kemandirian, sehingga angka pengangguran dapat semakin diminimalisir. Terkait dengan upah minimum, pemerintah harus benar-benar ikut mengadvokasi upah minimum yang layak bagi tenaga kerja agar kesejahteraan mereka semakin meningkat dan terhindar dari proses eksploitasi buruh. Terakhir, dalam upaya peningkatan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi membutuhkan sinergitas stakeholder swasta, CSO, *benefeciaries* dan aparatur pemerintahan itu sendiri untuk terlibat secara kolektif dalam upaya mereduksi angka kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (1) Aisyah, S., & Business, I. (2020). *Tracing the Labor Absorption Rate in the Medium and Large Industrial Sectors EcceS: Economics Social and Development Studies*. 7(2), 220–239.

- (2) Aiyedogbon, J. O. (2012). *Poverty and youth Unemployment in Nigeria , 1987-2011*. 3(20), 269–279.
- (3) Alkire, S. (2007). *Choosing Dimensions: The Capability Approach and Multidimensional Poverty*. 89–90.
- (4) Amal, B. K. (2018). The Exploring of Marxism Regarding The Poverty Sustainability in Kampung Nelayan Seberang, Belawan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(2), 79–92. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.15>
- (5) Anwar, A. F., & Aswandi, K. (2019). Silang Sengkarut Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan Dalam Pusaran Kapital (Studi Kasus: Megaproyek Reklamasi CPI Makassar). *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9540>
- (6) Arango, L. E., & Flórez, L. A. (2020). Regional Labour Informality in Colombia and a Proposal for a Differential Minimum Wage. *Journal of Development Studies*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/00220388.2020.1841170>
- (7) Aspromourgos, T. (2019). The Past and Future of Keynesian Economics: A Correction. *History of Economics Review*, 74(1), 81–83. <https://doi.org/10.1080/10370196.2020.1732021>
- (8) Averett, S. L., Smith, J. K., & Wang, Y. (2020). Minimum wages and the health of immigrants' children. *Applied Economics Letters*, 00(00), 1–8. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1784832>
- (9) Bardhan, P., & Roemer, J. E. (1994). On the Workability of Market Socialism. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 177–181. <https://doi.org/10.1257/jep.8.2.177>
- (10) Benfica, R., & Henderson, H. (2020). The Effect of the Sectoral Composition of Economic Growth on Rural and Urban Poverty. *Review of Income and Wealth*, (0). <https://doi.org/10.1111/roiw.12462>
- (11) Bradford, S. (2020). A global model of migration and poverty. *World Economy*, (September), 1–13. <https://doi.org/10.1111/twec.13051>
- (12) Braun, H., Döhrn, R., Krause, M., Micheli, M., & Schmidt, T. (2020). Macroeconomic long-run effects of the German minimum wage when labor markets are frictional. *Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und Statistik*, 240(2–3), 351–386. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2018-0080>
- (13) Dütsch, M., & Himmelreicher, R. (2020). Characteristics Contributing to Low-And Minimum-Wage Labour in Germany. *Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und Statistik*, 240(2–3), 161–200. <https://doi.org/10.1515/jbnst-2018-0076>
- (14) Ehret, M. (2014). Financial socialism: The role of financial economics in

- economic disorganization. *Journal of Business Research*, 67(1), 2686–2692. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.03.017>
- (15) Evensky, J. (1993). Retrospectives: Ethics and the Invisible Hand. *Journal of Economic Perspectives*, 7(2), 197–205. <https://doi.org/10.1257/jep.7.2.197>
- (16) Festré, A. (2019). *Michael Polanyi ' Vision of Economics : Spanning Hayek and Keynes*.
- (17) Gare, A. (2020). The Eco-socialist Roots of Ecological Civilisation. *Capitalism, Nature, Socialism*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/10455752.2020.1751223>
- (18) Ginting, A. L. (2019). Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 230. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.10957>
- (19) Greenhill, A., & Wilson, M. (2006). Haven or hell? Telework, flexibility and family in the e-society: A Marxist analysis. *European Journal of Information Systems*, 15(4), 379–388. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000632>
- (20) Heise, A. (2020). *Minimum wages and the resilience of neoclassical labour market economics. Some preliminary evidence from Germany*. Retrieved from <https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-93/>
- (21) Heitzmann, K., & Matzinger, S. (2020). The (changing) consideration of social investment in the design of welfare benefits: The case of poverty relief in Austria. *Social Policy and Administration*, (May), 1–16. <https://doi.org/10.1111/spol.12643>
- (22) Kaufman, B. E. (2010). Institutional Economics and the Minimum Wage: Broadening the Theoretical and Policy Debate. *ILR Review*, 63(3), 427–453. <https://doi.org/10.1177/001979391006300304>
- (23) Kaufman, B. E. (2020). Richard Lester's Institutional-Industrial Relations Model of Labor Markets and the Near-Zero Minimum Wage Employment Effect: The Model Card and Krueger Ignored but Shouldn't Have. *Journal of Economic Issues*, 54(4), 1002–1032. <https://doi.org/10.1080/00213624.2020.1818514>
- (24) Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010 Fitri Amalia\**. X, 158–169.
- (25) Kumah, C., Hilson, G., & Quaicoe, I. (2020). Poverty, adaptation and vulnerability: An assessment of women's work in Ghana's artisanal gold mining sector. *Area*, 52(3), 617–625. <https://doi.org/10.1111/area.12639>
- (26) Marjit, S., Ganguly, S., & Acharyya, R. (2020). Minimum wage, trade and

- unemployment in general equilibrium. *International Journal of Economic Theory*, 1–14. <https://doi.org/10.1111/ijet.12264>
- (27) McWilliam, A. R., Wianti, N. I., & Taufik, Y. (2021). Poverty and prosperity among Sama Bajo fishing communities (Southeast Sulawesi, Indonesia). *Singapore Journal of Tropical Geography*, 42(1), 132–148. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12349>
- (28) Modulates, P., & Behaviour, S. (2015). *This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Cognitive Psychology, available online: (January), 1–26.*
- (29) Oner, E. (2015). Comparative Interpretation of Classical and Keynesian Fiscal Policies (Assumptions, Principles and Primary Opinions). *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 4(2), 11–20. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v4i2.213>
- (30) Panda, S., & Padhi, B. (2020). Poverty and inequality in Odisha, India. *Journal of Public Affairs*, (January), 1–16. <https://doi.org/10.1002/pa.2220>
- (31) Refaeli, T., & Achdut, N. (2020). Perceived poverty, perceived income adequacy and loneliness in Israeli young adults: Are social capital and neighbourhood capital resilience factors? *Health and Social Care in the Community*, (July), 1–17. <https://doi.org/10.1111/hsc.13177>
- (32) Rioux, S., LeBaron, G., & Verovšek, P. J. (2020). Capitalism and unfree labor: a review of Marxist perspectives on modern slavery. *Review of International Political Economy*, 27(3), 709–731. <https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1650094>
- (33) Sabia, J. J., Pitts, M. M., & Argys, L. M. (2019). Are Minimum Wages a Silent Killer? New Evidence on Drunk Driving Fatalities. *Review of Economics and Statistics*, 101(1), 192–199. [https://doi.org/10.1162/rest\\_a\\_00761](https://doi.org/10.1162/rest_a_00761)
- (34) Sharaunga, S., & Mudhara, M. (2021). Analysis of Livelihood Strategies for Reducing Poverty Among Rural Women's Households: A Case Study of KwaZulu-Natal, South Africa. *Journal of International Development*, 33(1), 127–150. <https://doi.org/10.1002/jid.3516>
- (35) Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). The Politics of Market Socialism. *Journal of Economic Perspectives*, 8(2), 165–176. <https://doi.org/10.1257/jep.8.2.165>
- (36) Singerman, D. R. (2016). Keynesian eugenics and the goodness of the world. *Journal of British Studies*, 55(3), 538–565. <https://doi.org/10.1017/jbr.2016.56>
- (37) Soundararajan, V. (2019). Heterogeneous effects of imperfectly enforced minimum wages in low-wage labor markets. *Journal of Development Economics*, 140(June), 355–374.

<https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.06.010>

- (38) Stevans, L. K., & Sessions, D. N. (2001). Minimum Wage Policy and Poverty in the United States. *International Review of Applied Economics*, 15(1), 65–75. <https://doi.org/10.1080/02692170120013358>
- (39) Tuyen, T. Q. (2015). *Socio-Economic Determinants of Household Income among Ethnic Minorities in the North-West Mountains , Vietnam*. 17(1), 139–159. <https://doi.org/10.15179/ces.17.1.5>
- (40) Üşenmez, Ö. (2017). Turkey: In the Midst of Crisis, Between Liberal Utopia and Keynesian Regulation. *Siyasal Bilimler Dergisi*, 5(2), 245–262. <https://doi.org/10.14782/sbd.2017.74>
- (41) Wang, S., & Yang, D. (2020). The effects of poverty stereotype threat on inhibition ability in individuals from different income-level families. *Brain and Behavior*, 10(12), 1–14. <https://doi.org/10.1002/brb3.1770>
- (42) Wietzke, F. B. (2020). Poverty, Inequality, and Fertility: The Contribution of Demographic Change to Global Poverty Reduction. *Population and Development Review*, 46(1), 65–99. <https://doi.org/10.1111/padr.12317>
- (43) Wiguna, A. B., Ekonomi, J. I., Malang, K., & Minimum, U. (2019). *Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Timur : Apakah Upah Minimum Masih Menjadi Faktor Penentu ? Jurnal Ecces Abstrak : Penyerapan Tenaga Kerja Industri Provinsi Jawa Abstract : Industrial Employment in East Java Province : Does Minimum Wage Still Considered as The First*. 6, 214–229.
- (44) Workneh, M. A. (2020). Gender Inequality, Governance, and Poverty in Sub-Saharan Africa. *Poverty and Public Policy*, 12(2), 150–174. <https://doi.org/10.1002/pop4.278>